

## **BAB II**

# **KEBIJAKAN OBAMA DI SURIAH SERTA JANJI UNTUK BERTINDAK APABILA TERDAPAT PENGGUNAAN SENJATA KIMIA**

Suriah seringkali dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan perang sipil. Hal ini tentunya terjadi karena kedua hal tersebut merupakan kasus yang tampaknya belum dapat diselesaikan di negara yang dipimpin oleh Bashar al-Assad tersebut. Rezimnya yang merupakan gaya pemerintahan satu partai tersebut menuai berbagai kontra terhadap bagaimana ia membuat kebijakan. Dalam bab ini, penulis akan menggambarkan situasi Suriah dari perspektif Amerika Serikat dan memaparkan kontribusi dan bantuan yang telah AS lakukan dalam menangani konflik berkepanjangan tersebut. Terkait penggunaan senjata kimia, penulis akan memberikan gambaran bagaimana Suriah tetap melakukan senjata kimia meskipun mereka mengetahui bahwa penggunaan senjata tersebut akan menghasilkan kecaman dari dunia internasional termasuk Amerika Serikat sebagai negara yang mempromosikan nilai-nilai perdamaian. Sub-bab yang ditulis di bab ini akan menyediakan fakta fakta pendukung untuk membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian di bab selanjutnya dalam penulisan ini.

## 2.1 Situasi Suriah dari Perspektif Amerika

Semenjak Suriah dipimpin oleh Bashar al-Assad, anak dari Presiden Hafez al-Assad, perang sipil di Suriah sendiri semakin melebar. Suriah sendiri sudah terkenal dengan perang sipilnya dikarenakan tindakan penyerangan yang dilakukan menggunakan senjata kimia semenjak 2011.<sup>17</sup> Perang sipil yang terus berlangsung di Suriah ini menghasilkan sekitar 255 serangan kimia, terutama pada rezim Bashar al-Assad. Dari keseluruhan serangan-serangan yang terjadi selama perang sipil ini, perlu diketahui bahwa sistem politik yang berlangsung selama pemerintahan Bashar al-Assad menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan. Suriah yang diketahui sudah ada di dalam keadaan maraknya pengangguran, korupsi, dan kurangnya kebebasan dalam berpolitik ini disusul dengan adanya perang sipil, membuat situasi disana semakin menjadi-jadi.<sup>18</sup> Hal ini tentunya berdampak pada ketidakstabilan politik yang memberikan benturan-benturan internal di dalam negeri.

Berdasarkan laporan-laporan dari media, terutama media barat, Presiden Bashar al-Assad lah yang melakukan penyerangan-penyerangan terhadap masyarakatnya sendiri. Hal ini tidak menutup kemungkinan juga telah dilakukan penyerangan terhadap anak-anak.<sup>19</sup> Berbeda dengan cara mantan presiden sebelumnya yang merupakan ayahnya sendiri, Hafezal al-Assad menciptakan situasi internal yang stabil, meskipun dengan gaya pemerintahannya yang otoriter

---

<sup>17</sup> “255 Chemical Attacks Carried Out in Syria since 2011,” *Daily Sabah*, diakses pada 6 Agustus 2019, <https://www.dailysabah.com/politics/2019/08/06/255-chemical-attacks-carried-out-in-Syria-since-2011>

<sup>18</sup> “Syria Profile – Timeline,” *BBC*, 25 Februari 2019, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229>

<sup>19</sup> Tim Anderson, *The Dirty War on Syria* (Canada: Global Research, 2015), 25-26

(sistem satu partai).<sup>20</sup> Pindahnya kepemimpinan dari ayah (Hafezal) ke tangan anaknya (Bashar) menciptakan situasi politik yang dianggap tidak stabil karena ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik semakin parah. Tidak hanya itu, adanya penyerangan guna untuk menekan masyarakat pun dilakukan dan memakan korban jiwa yang sangat mengkhawatirkan. Konflik ini bukan hanya diakibatkan oleh sistem politik dan pemerintahan yang tidak adil. Di satu sisi, Pemerintahan di Suriah dianggap sangat dipengaruhi oleh *sectarian Islamist*.<sup>21</sup> Kelompok tersebutlah yang mendeklarasikan secara jelas diskriminasi akan kelompok lain melalui ujaran kebencian. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap langkah-langkah politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan dan juga untuk menaungi rakyatnya sendiri.

Perang sipil di Suriah ini telah menjadi sorotan bagi dunia internasional. Bukan hanya menjadi sorotan, konflik ini menjadi kekhawatiran bagi banyak negara karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan juga dapat membahayakan negara-negara tetangga Suriah. Berdasarkan laporan yang telah dilakukan oleh *Syrian Center for Policy Research*, memang ada peningkatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat, serta metode pengobatan yang meningkatkan kondisi hidup lebih baik hingga 2010.<sup>22</sup> Namun, dengan keadaan Suriah yang mengalami krisis juga dinilai menciptakan lingkungan yang tidak baik untuk kesehatan dan meningkatkan kemungkinan terjangkitnya penyakit dan kematian. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang menunjukkan adanya peningkatan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Anderson, *The Dirty War on Syria*, 27

<sup>22</sup> Syrian Centre for Policy Research, *Forced Dispersion: A Demographic Report on Human Status in Syria*, Syria: Syrian Centre for Policy Research, 2016, 455

yang sangat drastis di angka kematian karena sudah mencapai 470,000 korban jiwa pada tahun 2015, atau 1.9 persen dari total populasi Suriah.<sup>23</sup> Dalam laporan tersebut juga dinyatakan bahwa ada peningkatan angka kematian pada anak hingga 11.4 persen. Dari peningkatan yang sangat drastis tersebut, 77 persen dari 100 merupakan korban secara langsung dari krisis.<sup>24</sup> Melihat banyaknya korban tersebut, tentu saja negara-negara seperti Amerika Serikat tidak akan tinggal diam. Selain telah memakan korban jiwa, adanya pengembangan-pengembangan senjata non-konvensional juga turut menimbulkan kecemasan-kecemasan di dunia. Senjata-senjata yang seringkali digunakan oleh Suriah merupakan senjata kimia yang tentunya jauh lebih berbahaya dibandingkan senjata pada umumnya karena memberikan efek yang berkelanjutan. Di satu sisi, perang yang terjadi ini sudah menyebabkan 1,7 juta penduduk Suriah melarikan diri dimana Lebanon, Turki, dan Yordania setidaknya menampung 500.000 pengungsi korban perang.<sup>25</sup> Banyaknya jumlah pengungsi ditambah banyaknya pelanggaran kemanusiaan juga menambah masalah di kawasan dan menjadi masalah yang harus diselesaikan. Adanya konflik berkepanjangan ini lah juga yang menjadi alasan bahwa AS harus melakukan kontribusi dan memainkan perannya sebagai promotor perdamaian dunia dan *global policeman*.

---

<sup>23</sup> *Forced Dispersion: A Demographic Report on Human Status in Syria*, 61

<sup>24</sup> *Forced Dispersion: A Demographic Report on Human Status in Syria*, 62

<sup>25</sup> M. Zuhdi Jasser, "Sectarian Conflict in Syria," *PRISM, Vol 4, Syria Supplement* (2014): 58-67

## 2.2 Kebijakan Amerika Serikat di Suriah

### 2.2.1 Penyaluran Bantuan Amerika Serikat terhadap Konflik di Suriah

Dari waktu sebelum penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar al-Assad dilakukan, AS juga telah melakukan kontribusi seperti memberikan *humanitarian aid* kepada rakyat yang membutuhkan. Sebagai hegemoni, kontribusi ini penting dilakukan untuk menunjukkan kepedulian AS terhadap konflik tersebut dan menunjukkan kontribusinya sebagai pelopor dan pelindung dari kasus kemanusiaan. Sejak krisis dimulai, AS telah memberikan bantuan senilai hampir 1,4 milyar USD.<sup>26</sup> Bantuan ini juga terdiri dari makanan, akses air bersih, tempat berlindung, hingga bantuan medis kepada 4,2 juta orang di Suriah dan kurang lebih 2 juta pengungsi di wilayah sekitar yang terkena dampaknya.<sup>27</sup> Dengan jumlah sebesar ini, Amerika Serikat merupakan donor terbesar bagi warga Suriah yang menjadi korban dalam perang saudara ini.

Menurut pemerintahan AS pada masa Obama, warga di Suriah lah yang menanggung beban terbesar dari kasus kemanusiaan yang terjadi. Rezim Assad juga dinilai menjadi faktor terbesar yang menghasilkan korban yaitu warganya sendiri. Dalam upaya menyelesaikan kasus kemanusiaan serta menggulingkan rezim Assad, Amerika Serikat menggunakan berbagai macam medium seperti anak organisasi PBB, organisasi internasional, dan organisasi lokal di dalam Suriah untuk membantu korban-korban yang tersebar di seluruh penjuru Suriah.

---

<sup>26</sup> “Fact Sheet: U.S. Humanitarian Assistance in Response to the Syrian Crisis,” The White House President Barack Obama, diakses pada 28 Maret 2020, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/24/fact-sheet-us-humanitarian-assistance-response-syrian-crisis>

<sup>27</sup> *Ibid.*

### 2.2.2 Arah Kebijakan Amerika Serikat kepada Rezim Bashar al-Assad

Salah satu kepentingan nasional Amerika Serikat adalah untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan *American values* kepada negara lain. Dalam proses penyebaran nilai-nilai tersebut, terkadang terdapat hambatan yang menyulitkan AS dalam prosesnya. Salah satunya adalah rezim yang pada dasarnya tidak menganut paham-paham AS sama sekali. Seperti halnya Iraq dan Libya, Suriah menganut paham yang berbeda dari Amerika Serikat dimana hanya terdapat satu partai. Dari tahun ke tahun, masalah rezim yang otoriter juga telah menjadi fokus Amerika. Terdapat banyak pandangan mengenai cara AS harus bertindak tentang rezim yang tidak sejalan dengan prinsipnya tersebut. Pertama, memang pada dasarnya adalah tugas AS untuk mempromosikan kebebasan dan kedua, adalah menerima kenyataan bahwa pembuat kebijakan harus paham bahwa sistem politik di dunia beragam dan tidak dapat sesuai dengan kemauan sendiri.<sup>28</sup> Meskipun kedua cara sudah dilakukan, namun selalu terdapat metode dan cara bagi AS untuk melakukan cara pertama. Hal ini tentunya dapat dilihat dari bagaimana AS melakukan intervensi di Libya yang menggulingkan rezim Ghadafi, Hal serupa juga terjadi di Iraq pada tahun 2003 dimana AS melakukan serangan dan meruntuhkan rezim Iraq. Dari contoh diatas dapat dilihat juga bahwa pada dasarnya AS memiliki urgensi dan rela melakukan berbagai cara untuk menggulingkan rezim otoriter, seperti halnya yang sekarang masih dilakukan kepada pemerintah Suriah.

---

<sup>28</sup> Svante E. Cornell, "How Should America Deal with Authoritarian Regime," *The American Interest*, diakses pada 28 Maret 2020, <https://www.the-american-interest.com/2020/03/13/how-should-america-deal-with-authoritarian-states/>

Meskipun memang perbedaan rezim menimbulkan sikap tidak suka dari Amerika Serikat kepada rezim Suriah, namun ada faktor lain yang membuat sikap tidak suka ini menjadi lebih parah. Salah satunya adalah keterlibatan kelompok ekstremis dalam pemerintahan Suriah seperti halnya *Sectarian Islamist*. Pemerintahan Assad dinilai juga memiliki sejarah bekerjasama dengan grup teroris seperti Hamas dan Al Qaeda dalam melakukan strategi *divide and conquer*.<sup>29</sup> Hal ini membuat grup radikal Sunni memiliki akses yang lebih besar di dalam Suriah sendiri dibanding saat periode perang Iraq. Ditambah dengan dukungan dari rezim Assad terhadap militant Al-Qaeda dalam memasuki teritori Iraq dan membunuh orang Amerika.<sup>30</sup> Terbunuhnya orang Amerika dalam konflik tentunya membuat geram pemerintah Amerika Serikat sendiri seperti halnya terbunuhnya duta besar AS untuk Libya dalam suatu serangan pada tahun 2012. Memerangi terorisme merupakan salah satu kepentingan nasional Amerika Serikat yang vital. Selain dikarenakan adanya trauma atas tragedi 9/11, terorisme juga berlawanan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Amerika Serikat. Maka dari itu, keterlibatan rezim Assad dengan grup terorisme merupakan salah satu faktor yang AS memiliki alasan tersendiri untuk mengakhiri rezim otoriter tersebut.

Selain perbedaan rezim, dan kedekatan Assad dengan grup teroris, faktor lainnya yang menyebabkan ketidaksukaan AS terhadap rezim Assad adalah tentunya penggunaan senjata kimia.. Hal ini tentunya membuat geram Obama ketika senjata kimia sudah digunakan dalam perang dan menewaskan warga sipil. Sebelum Sarin

---

<sup>29</sup> M. Zuhdi Jasser, "Sectarian Conflict in Syria," *PRISM, Vol 4, Syria Supplement* (2014): 58-67

<sup>30</sup> *Ibid.*

digunakan, pemerintahan Suriah juga sering melakukan penyerangan menggunakan *chlorine* dan gas lainnya. Pasalnya, hingga tahun 2012, 98 persen serangan menggunakan senjata kimia berasal dari rezime pemerintahan Presiden Bashar Assad. Sedangkan, dua persen sisanya berasal dari pihak lain yakni *the Islamic State*.<sup>31</sup> Di tahun 2013 saja, dari total 5 kali penggunaan senjata kimia, dua serangan terindikasi menggunakan sarin dan tiga serangan lainnya menggunakan senjata kimia yang tidak teridentifikasi.<sup>32</sup> Dari serangan-serangan tersebut, terdapat satu serangan yang merupakan puncak dimana Obama pada saat itu, tidak dapat menolerir lebih jauh lagi. Serangan tersebut dikenal dengan *Ghouta Chemical Attack*, sebuah daerah yang tidak jauh dari Damaskus. Perbedaan serangan ini dengan serangan sebelumnya adalah serangan ini terbukti menggunakan Sarin yang merupakan senyawa kimia yang telah dilarang oleh Protokol Jenewa dimana Suriah merupakan salah satu negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Dalam kasus ini, oposisi Suriah, Liga Arab, dan Uni Eropa menyatakan bahwa rezim Assad bertanggung jawab atas serangan ini. Diperkirakan bahwa serangan ini menghasilkan 1.400 korban jiwa dan 3,600 orang lainnya mengalami luka-luka.<sup>33</sup> Pasalnya, sarin merupakan senjata kimia yang sangat berbahaya. Sarin yang apabila

---

<sup>31</sup> Clare Lombardo, "More Than 300 Chemical Attacks Launched During Syrian Civil War, Study Says," *NPR*, 17 Februari 2019, <https://www.npr.org/2019/02/17/695545252/more-than-300-chemical-attacks-launched-during-syrian-civil-war-study-says>

<sup>32</sup> Niall McCarthy, "How Many Chemical Attacks Have Been Documented in Syria: (Infographic)," *Forbes*, 16 April 2018, <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2018/04/16/how-many-chemical-attacks-have-been-documented-in-syria-infographic/#590a749565a1>

<sup>33</sup> Dany Shoham, "The Syrian Sarin Attacks of August 2013 and April 2017," *Begin-Sadt Center for Strategic Studies* (2017): 1



terpapar melalui saluran pernafasan ini dapat menyebabkan tremor, gagal pernafasan, fasikulasi dan kematian.<sup>34</sup>

Pada 29 April 2011, AS membahas perihal hak asasi manusia melalui sebuah sidang terkait kasus pelanggaran HAM di Suriah. Tujuan sidang ini adalah antara lain untuk mendesak Suriah untuk memberikan akses investigasi oleh PBB dalam sebuah *fact finding mission*.<sup>35</sup> Selain itu, melalui sebuah lembaga sosial bernama *Center for Media and Freedom of Expression*, AS mengajukan sebuah resolusi dimana terdapat sanksi yang menuntut Bashar al-Assad untuk turun dari jabatannya sebagai presiden meskipun hal ini kemudian tidak disetujui oleh Russia dan China. Selain sanksi tersebut, AS juga memberi sanksi berupa pembatasan pergerakan bagi pejabat dan diplomat Suriah yang berada di AS. Selain itu AS juga melakukan pemblokiran segala bentuk kekayaan bagi pejabat-pejabat tersebut. Tidak hanya pemblokiran terhadap pejabat saja, adanya akses ekspor impor kepada suriah juga menjadi salah satu hal yang dilarang sebagai cara AS untuk merespon berbagai pelanggaran yang dilakukan rezim Suriah.

Faktor-faktor diatas memiliki nilai penting yang melandasi pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri rezim Assad. Dari rezim yang otoriter, kedekatan dengan grup teroris, hingga penggunaan senjata kimia. Penggunaan senjata kimia merupakan klimaks dari berbagai pelanggaran yang telah dilakukan

---

<sup>34</sup> Shira Chapman, Shlomi Lazar & others, "Lung damage following whole body, but not intramuscular, exposure to median lethality dose of sarin: findings in rats and guinea pigs," *Inhalation Toxicology* (2019): 203

<sup>35</sup> "Fact Sheet on Syria," The White House President Barack Obama, diakses pada 29 Maret 2020, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/fact-sheet-syria>

rezim Assad yang pada akhirnya memaksa Obama untuk bertindak. Setelah itu AS juga seringkali memberikan sanksi kepada Suriah atas berbagai pelanggaran.

### **2.2.3 Kapabilitas Amerika Serikat untuk Melakukan Serangan atau Intervensi di Suriah**

Terkadang, dalam merespon suatu tindak kejahatan kemanusiaan, Amerika Serikat menggunakan instrument militernya yang berdiri di puncak dunia dalam bidang militer. Tidak hanya dari peringkatnya saja, namun anggaran dana yang dikeluarkan untuk pertahanan dan militer diestimasi mencapai 750 milyar USD.<sup>36</sup> Meskipun memang peringkat kedua dan ketiga diduduki oleh Russia dan Cina yang menjadi kompetitor terbesar, teknologi dan jumlah armada perang Amerika Serikat jauh lebih unggul dari segi jumlah hingga kualitas. Melihat peringkat tersebut, AS jauh diatas Suriah yang berada di peringkat 55. Maka dari itu sebenarnya instrument militer merupakan instrument yang dapat digunakan untuk membalas tindak kejahatan kemanusiaan di Suriah.

Dalam menyikapi kejadian tersebut, Obama dapat melakukan langkah dimana penggunaan militer seharusnya mampu menjadi solusi yang pas untuk membalas perbuatan rezim Assad tersebut. Pasalnya, *humanitarian intervention* Amerika Serikat memiliki 2 tujuan yakni, *humanitarianism* dan *national interest*.<sup>37</sup> Selain itu tujuan dari *humanitarian intervention* adalah “*to save lives, relieve*

---

<sup>36</sup> “2020 Military Strength Ranking,” Global Fire Power, diakses pada 29 Maret 2020, <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>

<sup>37</sup> Seung-Whan Choi. “What Determines US Humanitarian Intervention.” *Conflict Management and Peace Science* Vol. 30 No. 2 (2013): 121-139

*suffering, and/or distribute foodstuffs to prevent starvation*”.<sup>38</sup> Dari kasus Suriah sendiri, dapat dilihat bahwa telah terjadi pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan, dan dalam sejarah, dapat dilihat bahwa AS juga kerap melakukan intervensi. Tidak hanya itu, menurut Pickering dan Kisangani, AS juga kerap mengajukan alasan kemanusiaan untuk menjustifikasikan suatu intervensi seperti halnya kasus kemanusiaan di Somalia dan Haiti dimana AS mengirim militernya untuk melindungi korban kejahatan kemanusiaan.<sup>39</sup>

Selain alasan kemanusiaan, salah satu tujuan dari intervensi adalah yakni untuk mencapai kepentingan nasional. Melawan terorisme dan kejahatan internasional merupakan salah satu kepentingan nasional Amerika yang harus dijalankan. Hal ini tentunya dapat dilihat dalam peran AS dalam memerangi organisasi terorisme internasional seperti Al-Qaeda dan ISIS. ISIS juga di satu sisi merupakan organisasi terorisme yang berbasis dan memiliki wilayah di Suriah. Maka dari itu, seharusnya AS juga dapat melakukan pemberantasan terorisme yang merupakan kepentingan nasionalnya yang juga merupakan salah satu alasan dari tujuan *humanitarian intervention*. Tidak hanya itu, Obama juga menegaskan bahwa AS memiliki kepentingan nasional dalam memastikan — *when countries break international norms on chemical weapons they are held accountable*. Hal inilah yang menjadi landasan bahwa pada 31 Agustus 2013, Presiden Obama memutuskan bahwa akan merespon tuduhan penggunaan senjata kimia oleh Suriah tersebut dengan serangan militer.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Jeremy M. Sharp & Christopher M. Blanchard, “Armed Conflict in Syria: Background and U.S. Response,” *Congressional Research Service (CRS)* (2013): 15

### **2.3 Program Senjata Kimia di Suriah dan Kalkulasi Suriah sebelum Serangan Sarin 2013 Dilakukan**

Amerika Serikat merupakan negara *superpower* dunia yang memiliki kekuatan besar dalam militer dan banyak pengaruh di negara-negara di berbagai Kawasan. Di satu sisi, penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad tentunya telah dikalkulasi terlebih dahulu untuk mengetahui respon balasan apakah yang akan diberikan oleh Obama pada masa pemerintahannya. Terlebih lagi di saat itu, Obama telah mengecam pemerintahan Suriah dengan pernyataan “*Red Line*” kepada pemerintah Suriah mengenai penggunaan senjata kimia.

Seperti yang kita ketahui, penggunaan senjata kimia di Suriah bukan fenomena baru. Suriah sendiri memiliki gudang senjata kimia dan kemampuan operasional untuk menyerang menggunakan senjata tersebut termasuk peluru, bom, dan rudal.<sup>41</sup> Sejarah dari penggunaan senjata kimia sudah lama dimulai dari tahun 1970an. Pada saat itu, Suriah dinilai memulai persenjataan kimia mereka yang disebabkan oleh adanya konflik dengan Israel.<sup>42</sup> Program senjata kimia ini juga didukung oleh Mesir. Menurut Suriah, senjata kimia dinilai merupakan strategi yang dapat digunakan untuk *deterrence* di Kawasan yang pada saat itu mengalami tantangan akibat perang dingin. Meskipun demikian, tujuan penggunaan senjata kimia di Suriah tentunya tidak dapat dijadikan justifikasi yang sah. Apalagi salah satu tujuan senjata tersebut sekarang dispekulasikan untuk menyerang

---

<sup>41</sup> David Friedman, “Chemical Weapons in Syria: Has a Red Line Been Crossed?” *Institute for National Security Studies No. 421* (2013)

<sup>42</sup> Dany Shosham, “Guile, Gas and Germs: Syria’s Ultimate Weapons,” *Middle East Quarterly* (2002): 53-61

pemberontak, untuk diberikan kepada grup teroris, hingga digunakan untuk menyerang Israel.<sup>43</sup>

Terlepas dari keterlibatan Suriah dengan senjata kimia pada masa perang dingin, berita mengenai keterlibatan Assad dengan senjata kimia muncul pada tahun 2012. Namun demikian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Suriah, Jihad Makdissi, mengatakan bahwa tujuan senjata kimia tersebut adalah untuk menghadapi ancaman dari luar dan bukan untuk digunakan terhadap penduduknya.<sup>44</sup> Hal tersebut merupakan faktor yang melatarbelakangi Obama dalam pidato *red line* nya tersebut. Dalam menanggapi keterlibatan Assad dengan senjata tersebut, Obama menekankan bahwa AS dengan komunitas internasional akan mencari bukti yang mengarahkan pada penggunaan senjata kimia oleh Assad yang ditujukan untuk menyerang penduduknya sendiri.

Setahun dari pidato *red line* Obama, adanya serangan yang dilakukan Suriah di Ghouta tentunya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah mengapa hal tersebut tetap dilakukan meskipun sudah diberi kecaman oleh Amerika Serikat yang secara *power* jauh lebih kuat dari Suriah sendiri. Di satu sisi, AS juga sudah melakukan berbagai cara untuk membuktikan afiliasi Assad dengan senjata kimia. Obama juga sudah berkali-kali membawa masalah ini kepada PBB. Menanggapi hal tersebut, Suriah dinilai sudah mengkalkulasikan respon dari Amerika Serikat atau setidaknya berharap bahwa Amerika Serikat akan *inaction*

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Daryl Kimball & Kelsey Davenport, "Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2020," Arms Control, diakses pada 29 Maret 2020, <https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity>

sebelum melakukan serangan kimia tersebut.<sup>45</sup> Konflik perang sipil di Suriah yang sangat kompleks tentunya dapat membuat adanya serangan balasan dari AS tentunya tidak dapat dilakukan dengan semudah itu. Terlebih lagi, sekutu AS yakni Israel merupakan salah satu alasan Suriah membentuk program senjata kimia pada awalnya. Kedekatan AS dengan Israel yang sudah merupakan seperti “adik” dari AS tentunya menjadi faktor yang tidak ingin diresikokan apabila AS melakukan serangan. Hal itu merupakan faktor yang dibaca oleh Assad sebelum serangan sarin di Ghouta dilakukan.

#### **2.4 Obama Tidak Bertindak**

Salah satu hal mengejutkan yang terjadi dalam dunia politik di Timur Tengah adalah serangan sarin yang terjadi di 2013. Pasalnya, serangan tersebut tidak diduga dan tiba tiba terjadi begitu saja. Hal ini lah yang kemudian menjadi dilemma besar bagi Obama karena kredibilitas pemerintahan dan negaranya bergantung pada langkah yang ia lakukan. Terlepas dari hal tersebut, Obama kemudian memberikan pidato lanjutan pada tanggal 31 Agustus dimana ia dengan terang-terangan mengatakan bahwa ia akan membalas serangan tersebut dengan militer. Hal ini tentunya merupakan respon yang dinanti bagi masyarakat yang menentang jelas penggunaan senjata kimia yang membunuh ribuan orang tersebut. Meskipun Obama telah mengeluarkan pernyataan tersebut, pada akhirnya beliau lebih tertarik menggunakan pendekatan diplomasi dibandingkan menurunkan

---

<sup>45</sup> Roberta Haar, “To Strike Syria or Not: The Viewpoint from the White House,” *Atlantisch Perspectief AP:2013 nr8* (2013): 9-13

militernya sendiri. Hal ini tentunya sangat berbeda dari apa yang ia janjikan sebelumnya. Hal ini kemudian dianggap sebagai kegagalan besar Obama dalam menanggapi kasus kemanusiaan di Suriah.

Diamnya Obama tentunya membawa dampak lanjutan bagi negara-negara aliansinya yang biasanya ikut turun membantu AS dalam menghadapi isu kemanusiaan. Diamnya Obama dalam kasus ini pada akhirnya membuat Prancis juga enggan untuk melakukan serangan kepada Suriah karena tidak adanya bantuan dari sekutunya.<sup>46</sup> Padahal, sebelum tragedi ini terjadi, posisi Prancis cenderung berbeda dari AS dan Inggris dalam kasus Suriah. Keabsenan AS di Suriah pasca serangan kimia 2013 membuat publik bertanya soal kemanakah janji dan peran AS sebagai global. Maka dari itu, keabsenan di Suriah ini menjadi salah satu kegagalan Obama pada masa jabatannya sebagai presiden AS.

---

<sup>46</sup> Alassane Dembele, "The French Intervention in Syria," *Perspectives on Global Issues* (2016): 38-44

### **BAB III**

## **ANALISIS KEBIJAKAN TIDAK BERTINDAK OBAMA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA KIMIA SARIN DI SURIAH PADA TAHUN 2013**

Penggunaan senjata kimia pada serangan di Ghouta mendesak Obama dan pemerintahannya untuk merespon melalui pendekatan militer sebagaimana yang telah dipaparkan Obama pada pidatonya di tahun 2012. Namun dari faktor-faktor yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, Obama memilih untuk tidak melakukan pendekatan militer dan justru mengambil langkah diplomatik yang seakan mengingkari janjinya sebelumnya. Dalam penulisan ini, penulis mengidentifikasi hal tersebut sebagai tindakan tidak bertindak yang dijelaskan melalui *Inaction theory* sebagai *inaction*. Bab 3 ini akan menjawab pertanyaan penelitian serta menganalisa *Inaction* ingkar janji Obama terhadap pernyataannya sendiri mengenai penggunaan senjata kimia di Suriah.

Dalam bab ini, penulis akan membagi analisa menjadi 3 bab sesuai dengan konsep *status quo approach* yang merupakan alat analisa penulis dalam mengkaji *inaction* yang dilakukan Obama di Suriah. Konsep *time and resources*, *escalation concern*, dan *tolerance of American threshold* akan menjadi ide dari judul-judul sub bab agar pembaca dapat lebih mengerti analisis yang dikemukakan oleh penulis. Agar penulisan juga lebih terarah, untuk konsep *time and resources* yang akan



ditulis di sub bab 3.1 akan dibagi menjadi dua agar pembaca dapat lebih mudah mengidentifikasi perbedaan kedua konsep tersebut. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan bahwa dalam kasus ini, Obama bermaksud untuk mempertahankan status quo AS di Suriah dengan tidak melakukan adanya serangan kepada negara tersebut.

### **3.1 Ketidaktepatan Waktu dan Kurangnya Sumber Daya sebagai Penghambat Intervensi**

#### **3.1.1 Ketidaktepatan Waktu**

Penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Suriah pada tahun 2013 memang seharusnya ditindaklanjuti dengan militer. Namun, pada saat yang bersamaan terdapat juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan lanjutan. Dalam *status quo approach*, ketepatan waktu menjadi alat analisis untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu kebijakan. Sangatlah penting bagi pembuat kebijakan untuk mengetahui “apakah yang menjadi taruhannya”. Pada tahun 2013, AS memiliki prioritas lain yakni perjanjian nuklir dengan Iran yang merupakan salah satu kesuksesan Obama pada masa beliau menjabat.

Dari awal Iran memiliki program nuklir, hal ini sudah menjadi pertentangan banyak negara terutama AS. AS menilai bahwa program nuklir Iran digunakan untuk kepentingan militer agar posisi Iran di Timur Tengah semakin kuat. Di satu sisi, kawasan Timur-Tengah merupakan Kawasan yang politiknya cenderung tidak stabil dan adanya Iran dengan nuklirnya membawa ancaman kepada kepentingan AS di Timur-Tengah. Dari hal itu, AS melakukan berbagai cara untuk mencegah

Iran mendapatkan bom nuklir dengan berbagai cara seperti embargo dan memberikan sanksi ekonomi. Namun hal ini tidak berpengaruh dan Iran mengatakan bahwa program nuklirnya hanya digunakan sebagai alat pembangkit daya saja. Namun ternyata, AS mengetahui pada saat sebelum perjanjian dimulai Iran telah memiliki kapabilitas untuk setidaknya membuat 10-12 bom nuklir.<sup>47</sup> Maka dari itu, penting sekali bagi AS untuk membendung program nuklir Iran agar tidak sampai menghalangi kepentingan nasionalnya di Timur Tengah.

Perjanjian nuklir yang bernama *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) merupakan perjanjian untuk mereduksi nuklir Iran agar sanksi ekonomi terhadap Iran dapat diangkat. JCPOA hadir sebagai upaya yang dilakukan negara P5+1 (AS, Perancis, Inggris, Russia, Cina, dan Jerman) setelah melalui dua tahun diskusi. Dalam perjanjian ini Iran juga menjelaskan bahwa Iran akan tetap memiliki *enriched uranium* namun hanya untuk sebagai suplai daya dan tenaga pembangkit negaranya dan tidak digunakan lebih jauh sebagai senjata.<sup>48</sup> Di akhir, Iran juga sepakat untuk membiarkan adanya investigasi dan pemantauan dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA) yang pada akhirnya menyatakan bahwa Iran telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati sehingga sanksi terkait nuklir terhadap Iran diangkat. Perjanjian ini tentunya sangat penting baik AS pada saat itu karena dapat menghalangi Iran terhadap akses senjata nuklir. Selain membataskan akses terhadap proses produksi ulang bom nuklir oleh Iran, adanya

---

<sup>47</sup> Zaki Shalom, "The Obama Administration in Defense of the Nuclear Agreement with Iran," *Institute for National Security Studies No. 730* (2015):

<sup>48</sup> John Haltiwanger, "Here's What's in the 2015 Nuclear Deal with Iran that the Country withdrew from Amid Heightened Tensions with the US," *Business Insider*, 14 Januari 2020, <https://www.businessinsider.sg/iran-nuclear-deal-explained?r=US&IR=T>

juga dapat melindungi mitra AS yakni Israel, yang terancam dengan kekuatan nuklir Iran.<sup>49</sup> Alasan-alasan tentunya menjadi penting bagi negara-negara P5 di Dewan Keamanan PBB yang berharap besar kepada adanya perjanjian yang mengikat Iran untuk tidak melanjutkan program nuklir yang dapat dijadikan senjata pemusnah masal (WMD) di kemudian hari.

Merealisasikan JCPOA yang sudah diresmikan pada tahun 2015 berada di tangan Obama sebagai presiden saat itu. Upaya AS dalam merealisasikan JCPOA tentunya juga melalui proses yang panjang. Dalam proses tersebut, terdapat pertemuan dan pembicaraan yang bersifat rahasia yang merupakan inisiatif Obama sendiri. Hal ini tentunya dirahasiakan untuk mencegah ketakutan sekutu AS di Timur Tengah seperti Israel dan Arab Saudi yang tidak suka terhadap Iran.<sup>50</sup> Salah satu contoh pertemuan tersebut terjadi saat periode serangan sarin dilakukan oleh Suriah. Pada momen tersebut, negosiator AS dan Iran saling bertemu di Oman untuk membahas kelanjutan JCPOA.<sup>51</sup>

Dikarenakan JCPOA hadir sebagai prioritas Obama, maka dari itu tentunya terdapat ketakutan bahwa intervensi di Suriah mampu menghalangi keberhasilan perjanjian tersebut.<sup>52</sup> Obsesi Obama terhadap JCPOA juga dinilai menjadi alasan *inaction* yang terjadi dalam kasus Suriah. Pasalnya, Suriah merupakan kerabat dekat Iran dimana Iran telah membantu Bashar al-Assad mengambil alih sebagian

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Jay Solomon, *The Iran Wars: Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals that Reshaped the Middle East* (New York: Random House, 2016), 21

<sup>51</sup> Pamela Engel, "Obama Reportedly Declined to Enforce Red Line in Syria after Iran Threatened to Back Out of Nuclear Deal," *Business Insider*, 23 Agustus 2016, <https://www.businessinsider.sg/obama-red-line-syria-iran-2016-8?r=US&IR=T>

<sup>52</sup> Solomon, *The Iran Wars: Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals that Reshaped the Middle East*, 31

wilayahnya yang terebut saat perang. Meskipun memang JCPOA direalisasikan pada tahun 2015 dan serangan sarin dilakukan pada tahun 2013, namun proses perundingan dan dialog antar pihak sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Proses pengambilan keputusan Obama juga jelas dipengaruhi oleh adanya dialog dalam realisasi JCPOA.

Dalam mengkaji *inaction* melalui *status quo approach*, perlu dilihat juga bahwa ketidaktepatan waktu dapat menghasilkan kebijakan non intervensi atau tidak bertindak. Apabila terdapat urgensi lain yang memiliki tingkat prioritas lebih tinggi, maka hal itu lah yang harus dijadikan fokus utama bagi pembuat kebijakan. Dalam kasus ini, kebijakan yang lebih penting adalah merealisasikan JCPOA yang sekarang sudah terbukti menjadi salah satu kesuksesan terbesar dalam masa menjabat Obama sebagai presiden AS.

### **3.1.2 Kurangnya Sumber Daya**

Teori yang dipakai penulis membahas juga mengenai pentingnya memiliki sumber daya dalam membuat kebijakan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa militer, ekonomi, politik, dan diplomasi. Dalam menanggapi kasus kemanusiaan, sumber daya tersebut tentunya akan sangat dibutuhkan. Tapi pada 2013, AS cenderung kesulitan dalam mendapat bantuan-bantuan dari negara lain yang akan lebih memuluskan intensi AS untuk melakukan intervensi militer di Suriah. Sub bab ini akan membahas kurangnya sumber daya AS dari beberapa aktor yang dibutuhkan AS seperti Inggris, Jerman, dan kongres AS sendiri.

Pecahnya serangan sarin di Suriah yang menewaskan ribuan orang menghasilkan respon yang beragam dari negara-negara di dunia. Meskipun responnya berbeda, namun dapat dikatakan mayoritas respon adalah mengutuk perbuatan tersebut karena sangat tidak manusiawi dan terlebih lagi melanggar hukum internasional yang berlaku. Perlu diingat juga bahwa terdapat tiga negara yang memaparkan pandangannya mengenai insiden yang terjadi tersebut. Ketiga negara itu ialah Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Meskipun demikian, ketiga negara tersebut tidak sepenuhnya berada di *stance* yang sama mengenai pentingnya intervensi.

Inggris yang pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh David Cameron melihat bahwa memang pendekatan militer perlu untuk dilakukan.<sup>53</sup> Hal ini tentunya dilakukan atas dasar nama kemanusiaan dan memberi keadilan bagi rakyat yang menjadi korban dari serangan tersebut. Di satu sisi, Obama juga menjelaskan keharusan dilakukannya intervensi kemanusiaan. Namun poin dari AS lebih mengarah kepada melindungi kepentingan nasionalnya dan melindungi sekutu AS di Timur Tengah seperti Israel, Yordania dan Turki dari adanya potensi serangan terhadap teritori mereka. Ditambah lagi, AS merupakan negara pelopor dalam memberantas terorisme. Maka dari itu, intervensi perlu juga untuk dilakukan guna mencegah senjata kimia malah jatuh kepada tangan kelompok teroris yang dapat menyerang AS.<sup>54</sup> Di satu sisi, Perancis melihat bahwa intervensi penting untuk memberikan deterensi. Serangan tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa direspon begitu

---

<sup>53</sup> Johan D. Van der Vyver, "Military Intervention in Syria: The American, British, and French Alternatives and the Russian Option," *De Jure Vol 48* (2015): 36-54

<sup>54</sup> *Ibid.*

saja. Oleh karena itu, respons senjata harus difungsikan sebagai alat pencegahan agar Suriah tidak melakukan itu lagi dalam ruang lingkup apapun.<sup>55</sup> Meskipun pandangan ketiga negara mengarahkan kepada respon militer, namun ternyata hal tersebut tidak jadi dilakukan. Hal ini lah yang menjadi alasan Obama pada akhirnya memilih untuk melakukan pendekatan diplomatis yang berbeda dari respon yang ia berikan sebelum beliau mengecam Suriah melalui pidato *red line* dan *statement* beliau ketika serangan tersebut telah dilakukan. Di satu sisi, adanya spekulasi lain dari pengguna senjata kimia di Suriah juga masih belum jelas. Meskipun Assad dituding sebagai pelaku, namun ada juga negara-negara lain yang beranggapan bahwa pihak pemberontak lah yang menggunakan senjata kimia dalam serangan tersebut.

### **3.1.2.1 Perbedaan Pendapat dengan Jerman**

Salah satu orang yang Obama minta dukungan untuk melakukan intervensi adalah Kanselir Jerman, Angela Merkel. Obama sendiri memiliki kedekatan sendiri dengan Merkel dimana beliau sangat mengagumi sosok Merkel. Dukungan Jerman sangat penting bagi AS agar menunjukkan kesatuan antara AS dan Eropa. Namun demikian, Merkel beranggapan bahwa hasil investigasi dari PBB harus ditunggu. Pada momen tersebut, Merkel beranggapan bahwa PBB memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan laporan sehingga isu ini dapat diangkat ke Dewan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

Keamanan PBB.<sup>56</sup> Namun, melihat kedekatan antara Russia dan Suriah, pengajuan intervensi tentunya akan di veto dan intensi AS tidak akan dapat dijalankan.

Salah satu alasan mengapa Merkel berada di pihak yang sama dengan AS, Inggris, dan Perancis adalah karena belum ada bukti yang konkrit yang menunjukkan keterlibatan baik pihak pemerintah atau pun pemberontak terhadap senjata kimia. Apabila keterlibatan Assad telah terbukti dengan jelas, maka tentunya respon dari negara lain apalagi AS pasti akan berbeda. Dalam kasus ini, Inggris, Perancis, dan AS berada di halaman yang sama tentang tuduhan terhadap Bashar al-Assad atas serangan sarin. Namun, Jerman menganggap bahwa Assad bukan pelaku dari penyerangan tersebut.

Menurut data dari intelijen Jerman, BND, Bashar al-Assad tidak memberikan perintah mengenai serangan sarin yang terjadi.<sup>57</sup> Hal ini didapatkan dari rekaman telepon yang disadap melalui kerjasama antara BND, *German Intelligence Service* yang dioperasikan di garis pantai Suriah. Jika dilihat, hal ini tentunya juga berkaitan dengan wawancara Bashar al-Assad yang mengatakan bahwa tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ia lah pelaku dari serangan kimia di Ghouta.<sup>58</sup> Meskipun hal ini tentunya berbeda sekali dengan pandangan AS dan Inggris, ketua BND mengatakan bahwa tidak ada bukti konkrit juga yang mengindikasikan Assad sebagai pelaku dibalik serangan tersebut.

---

<sup>56</sup> Ben Rhodes, "Inside the White House during the Syrian 'Red Line' Crisis," *The Atlantic*, 3 Juni 2018, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/06/inside-the-white-house-during-the-syrian-red-line-crisis/561887/>

<sup>57</sup> Simon Tisdall & Josie Le Blond, "Assad Did Not Order Syria Chemical Weapons Attack, Says German Press," *The Guardian*, 9 September 2013, <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/08/syria-chemical-weapons-not-assad-bild>

<sup>58</sup> *Ibid.*

### 3.1.2.2 Tanpa Bantuan Inggris

Pernyataan David Cameron memang pada awalnya memberikan peluang bagi adanya balasan terhadap di Suriah. Namun permasalahannya terjadi ketika Inggris melakukan pemungutan suara untuk ikut terjun ke dalam permasalahan di Suriah. Pada proses pemungutan suara, hasil yang didapatkan justru adalah penolakan terhadap intervensi yang akan dipimpin oleh AS.<sup>59</sup> Dengan hasil 285-272, Cameron menjelaskan bahwa parlemen Inggris akan tidak ikut campur dalam kasus ini. Pemungutan suara yang dilakukan ini adalah suara dari rakyat Inggris yang merasa bahwa kejadian yang terjadi di Iraq merupakan pelajaran yang harus dievaluasi. Dalam keadaan ini, pemerintah Inggris tidak boleh bertindak gegabah namun harus menunjukkan sikap kepemimpinan yang terukur dan tenang.<sup>60</sup>

Inggris dan AS memang cenderung saling membantu dalam menangani kasus kemanusiaan. Namun dalam kasus ini, kenyataannya berbeda. Inggris melihat dalam kasus ini, bukti yang menunjukkan keterlibatan Assad dengan serangan tersebut belum jelas. Hal ini dikhawatirkan malah menjadi masalah baru seperti halnya tuduhan kepada Saddam Husein mengenai kepemilikan senjata pemusnah masal.<sup>61</sup> Hal ini juga ditambah dengan investigasi yang belum selesai dari PBB. Laporan yang dikeluarkan oleh intelijen Inggris hanya dapat mengatakan bahwa “sangat mungkin” Assad adalah pengguna dari senjata kimia tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> “Syria Crisis: Cameron Loses Commons Vote on Syria Action,” *BBC*, 30 Agustus 2013, <https://www.bbc.com/news/uk-politics-23892783>

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Steven Erlanger & Stephen Castle, “Britain’s Rejection of Syrian Response Reflects Fear of Rushing to Act,” *The New York Times*, 29 Agustus 2013, <https://www.nytimes.com/2013/08/30/world/middleeast/syria.html>

<sup>62</sup> *Ibid.*



Namun tuduhan tersebut tentunya masih belum dapat dijadikan alasan yang konkrit. Adanya dilema bahwa serangan akan menghasilkan efek yang efektif dan munculnya konflik regional yang lebih buruk merupakan faktor yang mempengaruhi kekalahan Cameron dalam memperjuangkan intervensi kemanusiaan di Suriah.

### 3.1.2.3 Kemungkinan Tidak Adanya Dukungan Kongres

Sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan intervensi tidak hanya terbatas dari dukungan negara lain saja, namun dukungan negara sendiri juga perlu. Pasalnya, akan percuma saja apabila AS mendapat dukungan dari Inggris dan Jerman namun legislatifnya sendiri tidak. Salah satu poin dari *status quo approach* di bagian *resources* membahas mengenai *domestic tolerance* yang berarti dukungan dari masyarakat.<sup>63</sup> Dalam kasus AS, Obama tidak dapat melakukan intervensi tanpa dukungan dari kongres. Dalam proses pembuatan kebijakan, Obama mendapat surat ancaman dari anggota republikan di kongres yang berbunyi: “*Engaging our military in Syria when no direct threat to the United States exists and without prior congressional authorization would violate the separation of powers that is clearly delineated in the Constitution.*”<sup>64</sup> Hal ini tentunya mengurangi kapabilitas AS untuk melakukan intervensi apalagi tanpa bantuan dari Inggris. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Mantan Menteri Luar Negeri AS, Robert Gates yang

---

<sup>63</sup> Michael McCarthy, Matthew Bower & Brett Venable, “The Action Versus Inaction Conundrum,” dalam *Deterring Russia in the Gray Zone* (Pennsylvania: US Army War College, 2019)

<sup>64</sup> Ben Rhodes, “Inside the White House during the Syrian ‘Red Line’ Crisis,” *The Atlantic*, 3 Juni 2018, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/06/inside-the-white-house-during-the-syrian-red-line-crisis/561887/>

menyatakan bahwa adanya serangan sama saja seperti dengan melempar bensin ke dalam konflik di Timur Tengah.<sup>65</sup>

Selain itu, alasan lain mengapa dukungan kongres sulit untuk didapatkan adalah karena bukti yang belum mencukupi. Seperti halnya dengan Jerman, beberapa pihak AS juga merasa bukti keterlibatan Bashar al-Assad belum tercukupi seluruhnya. Maka dari itu, laporan dari James Clapper yang merupakan Direktur Intelijen Nasional saat itu mengatakan kasus Suriah belum “*Slam Dunk*”.<sup>66</sup> Istilah ini adalah istilah yang digunakan untuk meyakinkan George Bush perihal senjata pemusnah massal yang dimiliki Iraq. Melihat pada periode Bush, kesalahan AS adalah menuduh Iraq memiliki WMD, Menteri Pertahanan Chuck Hagel juga mengatakan bahwa mereka tidak akan meminta anggota kongres untuk melakukan pemungutan suara berdasarkan bukti yang tidak valid.<sup>67</sup> Hal ini juga yang menjadi pertimbangan Obama sebelum menentukan tindakannya, Adanya intervensi yang dilakukan secara sepihak mampu mengakhiri siklus perang AS di Timur Tengah dalam tujuan perubahan rezim.

Dalam melakukan intervensi, AS kerap dibantu oleh negara-negara sekutunya. Hal ini dapat dilihat dari intervensi AS di Afghanistan dengan aliansinya dibawah komando dari NATO. Terkadang juga terdapat pandangan yang menyamakan kesamaan antara intervensi AS di Libya dan Suriah. Namun kedua

---

<sup>65</sup> Nomaan Merchant, ‘Gates, Panetta question Obama’s Syria strategy’, *Politico*, 18 September 2013, <https://www.politico.com/story/2013/09/robert-gates-leon-panetta-obama-syria-strategy-097045>

<sup>66</sup> Ben Rhodes, “Inside the White House during the Syrian ‘Red Line’ Crisis,” *The Atlantic*, 3 Juni 2018, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/06/inside-the-white-house-during-the-syrian-red-line-crisis/561887/>

<sup>67</sup> Josh Levs, “U.S. on Syria Chemical Attack: What’s the Evidence?” *CNN*, 9 September 2013, <https://edition.cnn.com/2013/09/09/world/syria-us-evidence-chemical-weapons-attack/index.html>

hal tersebut sangat berbeda. Intervensi AS yang dilakukan di Libya mendapat dukungan dari Liga Arab dan adanya mandate dari DK PBB sedangkan di Suriah hal semacam itu tidak ada.<sup>68</sup> Maka dari itu, dapat dikatakan juga apabila intervensi dipaksakan tanpa dukungan dari aktor lain, maka hal tersebut akan tidak efektif dan membawa masalah baru.

### **3.2 Menghindari Eskalasi Konflik yang Dapat Terjadi apabila Intervensi Dilakukan**

Dalam teori *Inaction*, telah dijelaskan beberapa poin yang dapat dikaitkan dengan analisis kasus ini. Salah satunya adalah poin yang menjelaskan mengenai kekhawatiran eskalasi konflik. Dalam membentuk sebuah kebijakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti komponen-komponen yang harus dihindari agar tidak memberikan dampak lanjutan dan masalah yang lebih parah. Salah satu hal yang disebutkan dalam poin ini adalah adanya bantuan dari pihak lain dapat memperparah konflik.<sup>69</sup> Agar pembaca lebih mengerti argumen penulis, penulis akan membagi sub bab ini kedalam dua bagian yakni menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan serta contoh pada intervensi-intervensi AS sebelumnya. Contoh intervensi dibutuhkan tentunya untuk memberikan argument yang lebih kuat bahwa intervensi AS cenderung membawa masalah baru yang tentunya tidak

---

<sup>68</sup> Kildron, Lance. "The Libyan Model and Strategy: Why it Won't Work in Syria." *Journal of Strategic Security* Vol. 5, no. 4 (2012): 33-50

<sup>69</sup> Michael McCarthy, Matthew Bower & Brett Venable, "The Action Versus Inaction Conundrum," dalam *Deterring Russia in the Gray Zone* (Pennsylvania: US Army War College, 2019)

diinginkan oleh Obama. Sementara itu, sub bab 2 akan membahas dukungan negara lain untuk menekekan Suriah agar tidak menggunakan senjata kimia lagi.

### **3.2.1 Menghindari Konsekuensi yang Tidak Diinginkan serta Contoh pada Intervensi-Intervensi Amerika Serikat Sebelumnya**

Masalah yang terjadi di Suriah merupakan produk dari perang sipil yang terjadi sejak tahun 2011. Selain instrument militer sebagai solusi, Obama telah menggunakan cara lain yaitu dengan berdiplomasi dan memberlakukan sanksi terhadap Suriah di tahun 2011.<sup>70</sup> Namun, setelah 2 tahun berlalu, tidak ada respon baik dari Suriah untuk tidak lagi menggunakan senjata kimia. Hal ini dapat membuktikan poin di teori mengenai apabila tidak adanya aksi yang dilakukan terhadap konflik, masalah akan terus ada dan bahkan meningkat. Meskipun sudah dilakukan pendekatan dan bahkan sanksi di tahun 2011. Berdasarkan laporan resmi badan PBB pada tahun 2013, "*Clear and convincing evidence*" merupakan kalimat yang disorot dalam laporan tersebut terkait penggunaan gas Sarin.<sup>71</sup> Situasi yang terus mencekam masyarakat di Suriah serta mengancam keamanan internasional ini tentunya dianggap memerlukan sebuah tindakan yang tegas namun tetap dengan objektif yang jelas untuk menghindari perpanjangan atau pelebaran konflik.

Meskipun memang situasi di Suriah membutuhkan tindakan yang tegas, namun eskalasi konflik tidak hanya sebatas terjadinya penggunaan senjata kimia

---

<sup>70</sup> "Statement by President Obama on the Situation in Syria," The White House President Barack Obama, diakses pada 10 April 2020, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/statement-president-obama-situation-syria>

<sup>71</sup> "'Clear and convincing' Evidence of Chemical Weapons Use in Syria, UN Team Reports," *UN News*, 16 September 2013, <https://news.un.org/en/story/2013/09/449052-clear-and-convincing-evidence-chemical-weapons-use-syria-un-team-reports>

lagi saja. Namun adanya aksi militer dapat menambah adanya eskalasi konflik baru yakni pecahnya perang berkepanjangan seperti halnya yang terjadi di Iraq. Seperti halnya yang dibahas di sub-bab 3.1, serangan yang dilakukan di Suriah justru malah menambah perang baru yang dapat berakibat pada serangan-serangan lain. Peralnya, dari contoh-contoh perang yang melibatkan AS seperti halnya intervensi Iraq, Afghanistan, dan Libya justru membawa AS kepada konsekuensi yang tidak diinginkan.<sup>72</sup> Maka dari itu, penulis akan memberikan contoh perang AS dimana terdapat konsekuensi tambahan yang tidak diperkirakan sebelumnya.

### 3.2.1.1 Perang Iraq

Perang yang memakan waktu sekiranya 8 tahun berawal dari tuduhan George W. Bush, selaku presiden AS saat itu, kepada Iraq bahwa mereka memiliki senjata pemusnah massal atau WMD. Hal ini merupakan awal dari perang yang memakan banyak korban. Pada saat itu, Bush berjanji kepada kongresnya bahwa ia akan menghilangkan WMD milik Iraq yang sebenarnya tidak ada.<sup>73</sup> Justru disini yang lebih berbahaya merupakan Korea Utara yang pada akhirnya membuat nuklir yang kemudian di tes pada 2006. Seperti yang kita tahu, hingga sekarang, nuklir Korea Utara masih aktif dan mengancam keamanan global.

Dalam buku *Unintended Consequences: How War in Iraq Strengthened America's Enemies* dipaparkan bahwa konsekuensi yang tidak disengaja meliputi; Iran yang lebih kuat, perang sipil yang mengdisintegrasi Iraq, dan Turki yang

---

<sup>72</sup> Roberta Haar, "To Strike Syria or Not: The Viewpoint from the White House," *Atlantisch Perspectief AP:2013 nr8* (2013): 9-13

<sup>73</sup> Peter W Galbraith, *Unintended Consequences: How War in Iraq Strengthened America's Enemies* (New York: Simon & Schuster, 2009), 3

dialienasi.<sup>74</sup> Hal ini terjadi karena tentunya ada miscalculasi sebelum kebijakan tersebut dilakukan dan justru malah membahayakan kepentingan nasional AS sendiri. Tidak hanya hal tersebut, konsekuensi lain berupa; Korea Utara yang memiliki nuklir, Ketidakstabilan Pakistan, Iran yang mengejar kapabilitas nuklir, serta ancaman Al-Qaeda.<sup>75</sup> Masalah-masalah tersebut tentunya tumbuh menjadi besar dan menjadi tugas tambahan bagi pemimpin AS dikemudian hari.

### **3.2.1.2 Perang Afghanistan**

Dalam mencapai tujuan AS untuk menyingkirkan Taliban dan Al-Qaeda dari Afghanistan, AS menggunakan milisi lokal untuk mencaai kepentingannya. AS juga memberikan bantuan-bantuan kepada milisi tersebut dikarenakan AS percaya bahwa milisi-milisi tersebut tahu cara memimpin pemerintahan nantinya. Untuk lebih mendapat popularitas, AS juga menggunakan milisi-milisi yang sudah lama berada di Afghanistan.<sup>76</sup> Namun ternyata hal ini juga membawa dampak yang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat.

Salah satu dampak negatif disini adalah ketidakselarasan antara AS sebagai donor dan milisi yang berperang. Hal yang terjadi adalah, milisi-milisi menggunakan dukungan AS untuk kepentingannya sendiri yang tidak berhubungan dengan intensi AS sendiri. Dalam kasus di Kunduz seperti contoh, AS ingin memanipulasi dukungan mereka agar sejalan dengan motif politik AS. Namun ternyata, situasi di lapangan yang jauh lebih kompleks membuat hal tersebut tidak

---

<sup>74</sup> *Ibid*, 109

<sup>75</sup> *Ibid*, 110

<sup>76</sup> Toon Dirkx, "The Unintended Consequences of US Support on Militia Governance in Kunduz Province, Afghanistan," *Civil Wars Vol 19* (2017): 377-401

terjadi. Seharusnya, para milisi akan bertindak sesuai kepentingan AS, namun ada juga grup milisi seperti Nabi Gechi dan milisi yang loyal kepada Mir Alam justru malah menyalahgunakan dukungan eksternal AS.<sup>77</sup>

Meskipun demikian, serangan AS disini dilandaskan salah satu alasan yakni tragedy 9/11 yang merupakan trauma yang menewaskan ribuan orang AS. Maka dari itu, George Bush pada saat itu menyerukan serangan kepada Afghanistan. Tidak hanya itu, serangan ini juga dibantu oleh aliansi AS dibawah NATO.

### **3.2.1.3 Perang Libya**

Perang AS di Libya merupakan perang dimana Obama tidak mendapat dukungan dari kongres AS. Sama dengan perang AS lainnya dengan mengatasnamakan demokrasi, perang ini pada akhirnya meruntuhkan rezim Gaddafi yang diklaim merupakan seorang diktator. Pada kasus Libya, AS memiliki komponen yang dibutuhkan untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Dalam pidato Obama pada 28 Maret 2011, Obama menjelaskan bahwa ia memiliki negara lain yang siap beraliansi, dukungan dari negara Arab, mandat dari dunia internasional, dan permintaan dari rakyat Libya sendiri.

Meskipun adanya kriteria tersebut, namun perang AS di Libya tidak memiliki dukungan dari kongres.<sup>78</sup> Hal ini kemudian berdampak pada ketidakstabilan di Libya. Obama tidak mementingkan siapakah yang akan menjadi pengganti Gaddafi ketika rezimnya runtuh. Hal ini kemudian terjadi dimana

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Rand Paul, "The Unintended Consequences of Interventionism," *National Review*, 31 Juli 2014, <https://www.nationalreview.com/2014/07/unintended-consequences-interventionism-rand-paul/>

pengganti Gaddafi dinilai adalah seorang jihadis yang dapat menyebabkan lebih banyak kekacauan dan peperangan.<sup>79</sup>

Hal yang bisa diambil dari contoh peperangan AS di Timur Tengah adalah akan selalu ada konsekuensi yang tidak diinginkan. Jika diperhatikan, kasus-kasus diatas memiliki kesamaan dengan Suriah. Contohnya, Pada saat perang Iraq, tuduhan Bush adalah hal yang salah karena Iraq tidak memiliki WMD. Di satu sisi, kasus Suriah juga belum terbukti jelas pada saat itu keterlibatan Assad dengan senjata kimia berlandaskan hasil laporan intelijen Jerman. Kedua adalah perang AS di Afghanistan memberikan contoh ketidakselarasan antara intensi AS sebenarnya dan hasil yang dicapai. Hal ini tentunya berkaitan juga dengan teori mengenai *escalation concern* dimana tentunya konflik yang lebih parah harus dihindari.<sup>80</sup> Poin ketiga dilihat dari perang AS di Libya yang dilakukan tanpa otorisasi dari *US Congress*. Meskipun memang rezim Gaddafi berhasil dicopot, namun penggantinya malah lebih menakutkan daripada rezim sebelumnya. Dalam bagian sub bab sebelumnya juga dibahas bahwa melakukan intervensi atau serangan militer tanpa adanya dukungan congress adalah pelanggaran *Separation of Power* dan melanggar konstitusi AS.

Dari sub-bab ini juga dibahas juga faktor-faktor yang dapat menyebabkan eskalasi konflik di masa yang akan datang. Semua itu tentunya akan terjadi apabila AS melakukan intervensi di Suriah. Dari pengalaman intervensi AS sebelumnya dapat dilihat bahwa konsekuensi yang tidak diinginkan justru berlawanan dengan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Michael McCarthy, Matthew Bower & Brett Venable, "The Action Versus Inaction Conundrum," dalam *Deterring Russia in the Gray Zone* (Pennsylvania: US Army War College, 2019)



kepentingan AS dan membawa masalah baru. Singkatnya, trauma-trauma ini menyebabkan AS untuk tidak bertindak di Suriah. Hal ini juga disampaikan Obama dalam proses pembuatan kebijakan di Suriah dimana ia menyesalkan intervensi AS di Iraq.<sup>81</sup>

### **3.2.2 Dukungan dari Negara-Negara Aliansi dalam Menekan Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah**

Dalam berbagai pernyataan Obama mengenai arah kebijakannya untuk menanggapi situasi di Suriah, Obama sempat menunda sementara otorisasi penggunaan kekuatan militer. Baginya sembari mendiskusikan permasalahan di Suriah dengan negara-negara aliansi, ada baiknya permasalahan ini diselesaikan melalui pendekatan yang diplomatis. Berdasarkan pernyataannya yang dirilis oleh *White House*, Obama telah menyebutkan diskusi-diskusi tersebut dilakukan bersama dengan negara-negara aliansinya seperti Perancis dan Inggris. Selain itu juga, Obama telah mengutus salah satu sekretarisnya untuk berdiskusi dengan pihak Russia terkait masalah ini yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi Obama langsung dengan Presiden Russia, Vladimir Putin. Sembari mengumpulkan dukungan dari negara-negara aliansi, Obama telah memerintahkan pasukan militer untuk tetap siap sedia dan selalu dalam posisi untuk memberikan tekanan kepada Assad apabila diplomasi yang diinginkan tidak kunjung menghasilkan hasil yang

---

<sup>81</sup> Ben Rhodes, "Inside the White House during the Syrian 'Red Line' Crisis," *The Atlantic*, 3 Juni 2018, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/06/inside-the-white-house-during-the-syrian-red-line-crisis/561887/>

baik.<sup>82</sup> Kebijakan Obama yang mengancam keras penggunaan senjata kimia oleh pemerintahan Assad sebagai senjata pembunuh massal tentunya didukung oleh negara-negara aliansi. Negara-negara aliansi pun juga bertanggung jawab untuk menciptakan komunitas internasional yang aman.

Kekhawatiran akan terjadinya eskalasi konflik ini pada umumnya juga dialami oleh berbagai negara aliansi AS. Dalam penjabaran teori yang mempertahankan *status quo* sebuah keadaan, kekhawatiran eskalasi konflik juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran adanya serangan yang dilakukan oleh negara berkonflik, dalam kasus ini Suriah, terhadap aliansi negara yang menekannya, dalam kasus ini AS.<sup>83</sup> Pemerintahan AS dalam konflik di Suriah tentunya memiliki peran yang cukup terbatas, terlebih dikarenakan posisinya yang sangat bertolak belakang dengan sudut pandang Suriah. Maka dari itu, AS mengajak negara-negara aliansi untuk melakukan pendekatan dengan Suriah untuk agar lagi menggunakan senjata kimia.

Selain negara-negara aliansi AS seperti Perancis dan Inggris, AS juga bekerja keras untuk meyakinkan negara-negara Arab untuk tidak membiayai para ekstrimis yang melawan rezim Assad. Hal ini dianggap malah akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi yaitu memperbanyak ekstrimis dan membuat masalah baru untuk dihadapi.<sup>84</sup> Keterlibatan seperti ini lah yang perlu dikalkulasikan untuk

---

<sup>82</sup> “Remarks by the President in Address to the Nation on Syria,” The White House President Barack Obama, diakses pada 20 April 2020, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/10/remarks-president-address-nation-syria>

<sup>83</sup> Michael McCarthy, Matthew Bower & Brett Venable, “The Action Versus Inaction Conundrum,” dalam *Deterring Russia in the Gray Zone* (Pennsylvania: US Army War College, 2019)

<sup>84</sup> Mark Landler, Jonathan Weisman, & Michael R. Gordon, “Split Senate Panel Approves Giving Obama Limited Authority on Syria,” *The New York Times*, 4 September 2013, <https://www.nytimes.com/2013/09/05/world/middleeast/divided-senate-panel-approves-resolution-on-syria-strike.html?pagewanted=all>

menghindari pelebaran masalah seperti yang dikhawatirkan dalam teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan poin dari teori tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa adanya penyerangan yang dilakukan Suriah dengan keterlibatan negara satu terhadap konflik negara lainnya. AS pun ingin menghindari melebarnya para ekstrimis yang berasal dari Suriah yang mungkin saja bisa menyebar secara global dan justru malah semakin mengancam keamanan dunia.

Kekhawatiran akan adanya eskalasi konflik juga pastinya dilandaskan kekhawatiran serangan kimia akan terjadi lagi. Hal yang menjadi penting bagi AS disini adalah keamanan negara-negara aliansinya. Seperti yang sudah dibahas di Bab 2, Awal Suriah memulai program senjata kimia adalah untuk menyerang Israel pada masa perang dingin. AS dan Israel merupakan dua negara yang sangat dekat dimana bantuan AS kepada Israel baik dalam bidang ekonomi dan militer dinilai mencapai jutaan USD. Maka dari itu penting juga bagi AS untuk melindungi negara mitranya.

Di satu sisi, adanya bantuan dari mitra AS juga dapat berpengaruh terhadap eskalasi konflik. Hal ini tentunya dapat dilihat juga dari respon-respon negara aliansi AS yang menolak untuk memberikan bantuan dalam intervensi. Hal ini tentunya dapat dilihat dari kekhawatiran negara-negara aliansi AS yang telah dibahas di sub-bab sebelumnya. Dalam teori *status quo approach* yang dilihat melalui poin kedua yakni *escalation concern*, negara harus memperhatikan adanya kemungkinan terjadinya konflik yang lebih parah dan harus dihindari.<sup>85</sup> Adanya

---

<sup>85</sup> Michael McCarthy, Matthew Bower & Brett Venable, "The Action Versus Inaction Conundrum," dalam *Deterring Russia in the Gray Zone* (Pennsylvania: US Army War College, 2019)

contoh intervensi AS dan koalisi pada perang-perang sebelumnya menjadi contoh yang dihindari agar eskalasi konflik di Suriah tidak menjadi lebih parah. Maka dari itu, dengan adanya kebijakan non intervensi AS, Obama tidak akan melibatkan AS lebih jauh ke dalam konflik yang terjadi di Suriah.

### **3.3 Tidak Adanya Ancaman terhadap Kepentingan Nasional Amerika Serikat**

Dalam *status quo approach* aspek *tolerability*, pembuat kebijakan harus memerhatikan beberapa hal sebelum mengambil langkah selanjutnya. Dalam kasus penggunaan senjata kimia di Suriah, pembuat kebijakan harus mengetahui kesanggupan negaranya sebelum terjun ke dalam konflik baru. Kesanggupan ini dapat dilihat dari keterlibatan AS dalam konflik lain yang dapat menyebabkan adanya prioritas baru malah jadi membawa dampak buruk. Selain itu, harus diketahui juga apakah ada nyawa orang AS yang dibahayakan dari konflik tersebut. Terakhir, dalam menganalisa *inaction*, perlu juga diketahui apakah *inaction* tersebut justru malah membahayakan kepentingan nasional AS.<sup>86</sup>

Sebagai negara yang aktif menangani masalah kemanusiaan, fokus AS pada tahun 2013 tidak hanya Suriah saja. Salah satu perang yang masih melibatkan AS pada saat itu adalah di Afghanistan. *Operation Enduring Freedom* (OEF) merupakan salah satu fokus Obama dalam memerangi terorisme. Meskipun memang pada tahun 2011 Obama telah menarik sebagian besar prajuritnya dari medan perang, OEF baru selesai pada akhir 2014 melalui pernyataan Obama dan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

Menteri Pertahanan Chuck Hagel.<sup>87</sup> Keterlibatan AS selama 13 tahun di Afghanistan tentunya bukan proses yang mudah, Berdasarkan paparan penulis di sub-bab sebelumnya, terdapat konsekuensi pahit yang harus AS terima dalam perang panjang yang setidaknya menewaskan 2.200 tentaranya. Perang ini juga dinilai sebagai trauma bagi Obama sehingga ia ragu terhadap pendekatan militer sebagai sebuah solusi untuk meredam konflik.

*Stance* Obama terkait intervensi kemanusiaan dan usahanya untuk meruntuhkan rezim Bashar al-Assad juga dipengaruhi oleh perang AS di masa lalu seperti perang Afghanistan.<sup>88</sup> Menurut Obama, setelah melalui proses perang selama satu dekade di Afghanistan, ia takut bahwa intervensi kemanusiaan justru akan membawa Suriah ke dalam situasi yang lebih parah.<sup>89</sup> Adanya trauma akan perang berkepanjangan merupakan satu hal yang tidak bisa ditolerir lagi oleh AS. Maka dari itu, hal ini menjawab poin *tolerability* untuk mengetahui kapabilitas nasional agar dapat menghindari konflik lain. Keterlibatan AS dalam perang Afghanistan tidak hanya membawa konsekuensi yang tidak diinginkan seperti halnya yang dibahas pada sub-bab sebelumnya, namun juga merupakan trauma tersendiri yang melandasi sikap Obama terhadap opsi militer sebagai solusi bagi Suriah. Maka dari itu Obama menjanjikan kepada rakyat AS bahwa ia akan menghindari perang besar dan pendekatan yang *open-ended* dimana kasus perang

---

<sup>87</sup> "U.S. Periods of War and Dates of Recent Conflicts," *Congressional Research Service RS21405* (2019): 7

<sup>88</sup> Rosa Mazza-Hilway, "Regime Change, Deferred: Regarding United States' Foreign Policy in Syria," *Political Analysis: Vol. 20, Article 2* (2019)

<sup>89</sup> *Ibid.*

sipil Suriah serta penggunaan sarin sebagai konflik yang masuk kedalam kategori tersebut.<sup>90</sup>

Tragedi serangan kimia yang terjadi di Ghouta memang merupakan hal yang naas. Serangan sarin yang menewaskan ribuan korban jiwa termasuk anak-anak merupakan hal yang dikutuk oleh hampir semua negara di dunia. Adanya korban ini juga dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menganalisa *inaction*. Meskipun serangan tersebut memang tragis, namun serangan ini tidak menewaskan satu pun nyawa warga negara AS. Selain itu, mayoritas orang AS juga menolak adanya intervensi AS kepada Suriah. Mereka menilai bahwa AS tidak memiliki tanggung jawab untuk ikut turun ke dalam konflik di Suriah.<sup>91</sup> Hal ini tentunya juga berlaku kepada pengiriman bantuan kepada pemberontak Suriah yang menginginkan perubahan rezim. Maka dari itu, hal ini menjawab alasan *inaction* Obama yang dianalisa melalui *status quo approach* konsep *tolerability*. Pasalnya, menurut konstitusi AS, presiden tidak dapat mengambil keputusan sepihak untuk melancarkan serangan militer yang tidak ditujukan untuk melindungi negara dari adanya ancaman.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Bruce Drake, "U.S aid to Syrian rebels: Public has opposed American Involvement in the past," *Pew Research Center*, 4. Juni 2013, <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/14/u-s-aid-to-syrian-rebels-public-has-opposed-american-involvement-in-the-past/>

